BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian mengenai Analisis Kompetensi Teknis Fungsional Barang dan Jasa di Sekretariat Daerah Kota Makassar menunjukkan bahwa tingkat kompetensi pejabat fungsional pengadaan telah berada pada kategori baik, dengan rata-rata capaian hasil kuesioner sebesar 76 persen. Hal ini mencerminkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengembangan kompetensi teknis di lingkungan UKPBJ telah berjalan cukup efektif dan berkontribusi terhadap peningkatan profesionalisme aparatur pengadaan. Pemerintah Kota Makassar melalui UKPBJ telah menerapkan berbagai strategi penguatan kapasitas, seperti pelatihan, sertifikasi keahlian, pemanfaatan sistem e-learning, serta pembentukan forum berbagi pengetahuan yang mendorong pembelajaran berkelanjutan di kalangan pejabat fungsional. Berdasarkan hasil analisis dan temuan penelitian, kesimpulan per indikator kompetensi adalah sebagai berikut:

1. Kompetensi Perencanaan Pengadaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi perencanaan pengadaan di UKPBJ tergolong sangat baik, dengan rata-rata capaian 82%. Pejabat fungsional PBJ telah mampu menyusun dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP), Kerangka Acuan Kerja (KAK), serta Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan tingkat ketelitian yang tinggi dan koordinasi yang baik bersama

SKPD. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip efektivitas organisasi sebagaimana dikemukakan oleh Steers (1985), yakni kejelasan tujuan, kemampuan sumber daya manusia, dan koordinasi lintas unit kerja.

2. Kompetensi Pemilihan Penyedia

Kompetensi dalam tahap pemilihan penyedia menunjukkan hasil baik dengan rata-rata capaian 79%. Pejabat fungsional PBJ telah mampu melaksanakan proses lelang secara profesional melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), menjamin prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Meskipun demikian, aspek analisis teknis terhadap penawaran kompleks serta penyusunan berita acara hasil pelelangan (BAHP) masih memerlukan peningkatan melalui pelatihan tematik dan evaluasi berkala.

3. Kompetensi Pengelolaan Kontrak

Kompetensi dalam pengelolaan kontrak berada pada kategori baik dengan capaian 71%. Pejabat fungsional telah memahami prinsip pengawasan dan pelaporan kontrak, namun masih perlu peningkatan dalam kemampuan analisis isi kontrak, penyusunan adendum, serta penyelesaian perselisihan dengan penyedia. Pelatihan lanjutan dan pendampingan teknis perlu diperkuat agar pengelolaan kontrak lebih efektif dan meminimalkan risiko administratif maupun hukum.

4. Kompetensi Pengelolaan Pengadaan Secara Swakelola

Hasil analisis menunjukkan bahwa kompetensi pengelolaan pengadaan secara swakelola masih berada pada kategori cukup baik dengan capaian 66%. Pejabat fungsional telah memahami prinsip dasar pelaksanaan swakelola, namun masih membutuhkan peningkatan pada aspek evaluasi kegiatan, analisis risiko kontraktual, serta koordinasi antarunit pelaksana. Pembinaan teknis yang lebih intensif diperlukan agar pelaksanaan swakelola dapat berjalan efektif, efisien, dan akuntabel sesuai regulasi LKPP Nomor 3 Tahun 2021.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa kompetensi teknis fungsional PBJ di Sekretariat Daerah Kota Makassar telah berkembang secara positif dan mendukung terciptanya tata kelola pengadaan yang profesional, transparan, serta berorientasi pada nilai manfaat (value for money). Keberhasilan tersebut didukung oleh komitmen pimpinan, kebijakan pembinaan kompetensi yang berkelanjutan, serta sinergi kelembagaan antara UKPBJ, SKPD, dan LKPP. Penguatan berkelanjutan terhadap aspek analisis teknis, inovasi pengadaan, dan manajemen risiko diharapkan dapat menjadikan UKPBJ Kota Makassar sebagai pusat unggulan pengadaan (center of excellence) di tingkat pemerintah daerah..

B. Saran

Hasil penelitian menunjukkan perlunya penguatan berkelanjutan terhadap kebijakan dan praktik pengembangan

kompetensi teknis fungsional PBJ. Beberapa saran yang dapat dijadikan acuan bagi Pemerintah Kota Makassar antara lain:

1. **Peningkatan Anggaran dan Fasilitas Pengembangan**

   Dukungan anggaran perlu ditambah agar pelatihan dan sertifikasi dapat menjangkau seluruh pejabat fungsional PBJ. Penyediaan sarana pembelajaran modern akan mempercepat peningkatan kompetensi aparatur.

2. **Optimalisasi Pembelajaran Digital**

   Platform e-learning perlu dikembangkan secara interaktif dan disesuaikan dengan kebutuhan pengadaan di lapangan agar berdampak langsung pada peningkatan kinerja individu.

3. **Penguatan Koordinasi UKPBJ dan SKPD**

   Koordinasi perlu diperkuat melalui forum rutin dan evaluasi bersama guna menyamakan persepsi serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengadaan.

4. **Peningkatan Kompetensi Analitis dan Inovatif**

   Pejabat fungsional perlu dilatih agar lebih adaptif, analitis, dan inovatif dalam menghadapi perubahan kebijakan serta dinamika penyedia barang dan jasa.

5. **Penguatan Budaya Evaluatif dan Knowledge Sharing**

   Evaluasi kinerja dan kegiatan berbagi pengetahuan perlu dijadikan budaya organisasi untuk memperkuat pembelajaran kolektif dan peningkatan profesionalitas.

Penerapan saran tersebut diharapkan memperkuat efektivitas kebijakan pengembangan kompetensi di UKPBJ Sekretariat Daerah Kota Makassar serta mendukung terwujudnya sistem pengadaan yang profesional, transparan, dan berintegritas sesuai prinsip *good governance*.

C. Produk Tesis

Keluaran dari tesis ini berupa *Policy Brief* berjudul: **"STAR PBJ ADAPTIF."**

Policy brief tersebut memuat rekomendasi strategis mengenai peningkatan kapasitas fungsional PBJ, penguatan sistem pembelajaran digital, serta pengembangan model pembinaan kompetensi berkelanjutan. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Kota Makassar dan UKPBJ dalam merancang kebijakan pengembangan SDM pengadaan yang adaptif terhadap transformasi digital dan tuntutan pelayanan publik modern.